

## ABSTRAK

### **Abdul Mutolib : “Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dihubungkan Dengan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang”**

Lahirnya UU Cipta Kerja mendapat kritik dari berbagai pihak karena kecenderungannya terhadap kepentingan pengusaha dan mengabaikan hak-hak masyarakat khususnya ditinjau dari aspek pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. UU Cipta Kerja telah menghapus izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan serta pemangkasan hak-hak masyarakat khususnya dalam proses penyusunan Amdal.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis politik hukum UU Cipta Kerja terhadap kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia dan menganalisis konsekuensi perubahan partisipasi masyarakat dalam penyusunan Amdal dihubungkan dengan Pasal 22 UU Cipta Kerja.

Penelitian ini menggunakan Teori Negara Kesejahteraan sebagai *Grand theory*, Teori Partisipasi Masyarakat (Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Undang-Undang dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan) sebagai *Middle theory* dan Teori Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup yang meliputi Teori Pembangunan Berkelanjutan dan teori Analisis Mengenai Dampak Lingkungan sebagai *Applied theory*. Teori dalam penelitian bertujuan untuk mengkaji perubahan partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan Amdal pasca lahirnya UU No. 6 Tahun 2023.

Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode *Library Research*. Penelitian ini menggunakan tiga jenis bahan sumber hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data diperoleh melalui studi kepustakaan (dokumen) yang berasal dari bahan penelitian yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam proses penerbitan Amdal pasca UU Cipta Kerja. Analisis data menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.

Politik hukum UU Cipta Kerja mengarah pada penyederhanaan izin berusaha dan mendorong kemudahan investor dalam memperoleh persetujuan lingkungan yang mengubah lima kebijakan penyusunan Amdal yang meliputi: 1) kemudahan izin berusaha melalui persetujuan lingkungan; 2) pelonggaran tanggung jawab mutlak (*strict liability*) pemrakarsa dalam menyusun Amdal, 3) pembatasan prinsip transparansi informasi dalam penerbitan persetujuan lingkungan, 4) penghapusan gugatan administratif terhadap persetujuan lingkungan; dan 5) penghapusan sanksi pidana terhadap penyusun UU Cipta kerja mereduksi partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan Amdal. Saat ini hanya masyarakat yang terdampak langsung yang dapat berpartisipasi dalam proses penyusunan Amdal.

Kata Kunci: Amdal, Partisipasi, Persetujuan lingkungan, UU Cipta Kerja

## ABSTRACT

**Abdul Mutolib : “Community Participation in Preparing of Environmental Impact Assesment is Linked to Article 22 of Law Number 6 of 2023 concerning the Determination of Government Regulations in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation into Law”**

The Job Creation Law received criticism from various parties because of its tendency towards the interests of entrepreneurs and ignoring the rights of the community, especially in terms of environmental management and protection. The Job Creation Law has abolished environmental permits to become environmental approvals and curtailed community rights, especially in the Environmental Impact Assesment (EIA) preparation process.

This research aims to analyze the legal politics of the Job Creation Law on environmental protection and management policies in Indonesia and analyze the consequences of changes in community participation in the preparation of EIA in relation to Article 22 of the Job Creation Law.

This research uses Welfare State Theory as the Grand theory, Community Participation Theory (Community Participation in Drafting Laws and Community Participation in Development) as Middle theory and Environmental Management and Protection Theory which includes Sustainable Development Theory and Environmental Impact Analysis theory as Applied theory. The theory in the research aims to examine changes in community participation in the Amdal preparation process after after the ratification of Law No. 6 of 2023.

The research uses a normative juridical approach with library research methods. This research uses three types of legal source materials, namely primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Data was obtained through literature (document) studies originating from research materials related to community participation in the EIA issuance process after the Job Creation Law. Data analysis uses a qualitative descriptive approach.

The legal politics of the Job Creation Law leads to the simplification of business permits and makes it easier for investors to obtain environmental approval which changes the five policies for preparing EIA which include: 1) ease of business permits through environmental approval; 2) relaxation of the absolute responsibility (strict liability) of the initiator in preparing the EIA, 3) limitation of the principle of information transparency in the issuance of environmental approvals, 4) elimination of administrative lawsuits against environmental approvals; and 5) eliminating criminal sanctions against drafters of the Job Creation Law reduces public participation in the EIA preparation process. Currently only communities directly affected can participate in the Amdal preparation process.

Keywords: EIA, Participation, Environmental approval, Job Creation Law